

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Teori Agensi**

Hubungan antara *principal* dengan *agent* disebut dengan hubungan keagenan. Apabila dikaitkan dengan teori agensi, pemerintah daerah merupakan agensi sementara masyarakat merupakan *principal* (Khasanah dkk, 2017). Masyarakat selaku *principal* memberikan amanat kepada pemerintah daerah untuk menjalankan roda pemerintahan. Pemerintah daerah selaku *agent* memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil pelaksanaan pemerintahan kepada masyarakat. Hasil dari pelaksanaan pemerintahan terkait dengan penggunaan sumber daya yang telah dipercayakan masyarakat sebagai *principal* yaitu dalam bentuk laporan keuangan (Dewi dan Purwanto, 2022).

#### **2.2. Teori Sinyal**

Teori sinyal merupakan teori dimana pemerintah memberikan sinyal kepada masyarakat atas kinerja yang telah dilaksanakan. Kinerja pemerintahan yang baik perlu diinformasikan kepada rakyat baik sebagai bentuk pertanggungjawaban (Zulva dkk, 2018). Pemerintah akan memberikan signal ke masyarakat dengan cara memberikan laporan keuangan yang berkualitas, peningkatan sistem internal kontrol, pengungkapan yang lebih lengkap, penjelasan lebih detail dalam website. Pemerintah daerah dapat juga mengemas informasi prestasi dan kinerja keuangan

dengan lebih lengkap untuk menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan amanat yang diberikan oleh rakyat (Puspita dan Martani, 2012).

Tanggung jawab pemerintah untuk memberikan sinyal berupa informasi positif merefleksikan langkah untuk memberikan keyakinan yang memadai pada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah pun ditekan oleh masyarakat agar konsisten menyajikan pencapaian pemerintah serta kinerjanya. Dorongan untuk memberikan informasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah muncul dikarenakan adanya kesenjangan informasi pemerintah daerah dengan masyarakat. Kesenjangan informasi muncul disebabkan oleh tidak diketahuinya informasi internal pemerintah oleh masyarakat (Sutaryo dan Amanu, 2020).

### **2.3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Laporan keuangan pemerintah daerah yang selanjutnya disingkat LKPD adalah pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018). Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilaikondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010).

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010):

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran

yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

#### 5. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Laporan keuangan pokok terdiri dari seperti yang diungkapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
3. Neraca
4. Laporan Operasional (LO)
5. Laporan Arus Kas (LAK)
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

#### **2.4. *Internet Financial Reporting***

Peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2007 menyatakan bahwa kepala daerah wajib memberikan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada masyarakat melalui media cetak dan/atau media elektronik. Media elektronik yang dimaksud dapat merujuk kepada *website* milik pemerintah daerah yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk mengungkapkan informasi

kepada masyarakat (Puspita dan Martani, 2012). Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 juga menyatakan bahwa penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah (SIKD) antara lain penyajian informasi keuangan daerah melalui situs resmi pemerintah daerah.

Dewi dan Purwanto (2022) menyatakan bahwa perhatian atas transparansi di Indonesia ditandai dengan dilahirkannya UU No. 14 tahun 2008 oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Pasal 9 Ayat (4) UU KIP menyatakan informasi publik seperti informasi keuangan harus disampaikan melalui media yang mudah dijangkau oleh publik dan bahasa yang tidak sulit dipahami. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memfungsikan media internet sebagai media penyebarluasan informasi yang dianggap cepat dan *real time*.

Saat ini pertukaran informasi yang lebih mudah dan murah, hal ini dikarenakan perkembangan teknologi informasi digitalisasi yang semakin pesat. Akses internet semakin lama semakin meningkat sebab biaya untuk mengakses internet murah dan pilihan alat untuk mengakses internet semakin banyak. Tingkat akses internet di Indonesia beragam dan dipengaruhi oleh kondisi demografi daerah seperti tingkat pendidikan, kesejahteraan, dan kecepatan akses internet, sehingga akan mempengaruhi besaran masyarakat yang mengakses internet. Akses internet merupakan salah satu media untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan pemerintahan (Hardiningsih dkk, 2021).

Pemerintah juga harus memberikan kemudahan akses kepada masyarakat untuk melihat maupun mengunduh laporan keuangan. Kemudahan aksesibilitas

*internet financial reporting* harus disediakan pemerintah untuk mengakomodasi tingginya *awareness* masyarakat terhadap kebutuhan informasi terkait pengelolaan keuangan yang telah dilakukan pemerintah selama ini. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap informasi keuangan pemerintah terlihat dari tingginya jumlah kunjungan (*visitor*) di beberapa situs *website* yang dimiliki pemerintah, serta banyaknya permintaan data terkait laporan keuangan pada situs PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) masing- masing daerah (Khasanah dkk, 2017).

## **2.5. Ukuran Pemerintah Daerah**

Ukuran pemerintah daerah menunjukkan besar arau kecilnya pemerintahan suatu daerah. Ukuran pemerintah daerah dapat diukur dengan total aset, jumlah pegawai, dan total pendapatan (Damanpour, 1991 dalam Sari, 2016). Ukuran pemerintah daerah diukur dengan total aset. Total aset dipilih karena nilainya yang lebih stabil daripada pendapatan, jumlah pegawai ataupun total produksi suatu daerah. Semakin besar aset yang dimiliki suatu daerah maka semakin besar ukuran pemerintah daerah tersebut (Sari, 2016).

Ukuran pemerintah daerah yang besar dalam pemerintah akan memberikan kemudahan kegiatan operasional yang kemudian akan mempermudah dalam memberi pelayanan masyarakat yang memadai. Pemerintah daerah yang besar memiliki kewajiban untuk meningkatkan akuntabilitas karena ukuran pemerintah daerah yang besar akan diikuti dengan risiko penyalahgunaan yang besar. Masyarakat pastinya tidak akan menuntut,

apabila masyarakat sudah merasakan sendiri kenyamanan yang diberikan pemerintah atas hasil dari kinerja pemerintah yang baik (Kusumawardani, 2012).

Penggunaan sumber daya yang banyak akan meningkatkan pengawasan oleh masyarakat. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat melakukan pengawasan dengan maksimal. Pengungkapan laporan keuangan merupakan salah satu cara dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Adanya kebutuhan yang besar dalam pengungkapan laporan keuangan oleh pemerintah maka diharapkan pemerintah dapat mengadopsi berbagai metode untuk pengungkapan tersebut. Internet merupakan media yang efisien dan memuaskan yang dapat digunakan oleh pemerintah yang memiliki ukuran yang besar dalam menyampaikan laporan keuangannya secara sukarela (Wau dan Ratmono, 2015).

## **2.6. Pendapatan per Kapita**

Pendapatan perkapita adalah pendapatan rata-rata suatu penduduk di suatu wilayah (Putra dan Syofyan, 2020). Angka yang digunakan semestinya adalah total pendapatan regional dibagi jumlah penduduk. Tetapi angka ini sering kali tidak diperoleh sehingga diganti dengan total pendapatan regional bruto (PDRB) (Hanum dan Sarlia, 2019).

Pendapatan per kapita merupakan sebuah indikator yang sangat dikenal, terutama oleh para birokrat yang berkecimpung dalam penanganan peningkatan kemakmuran masyarakat. Semakin tinggi PDRB perkapita suatu wilayah semakin

baik tingkat perekonomian wilayahnya, walaupun ukuran ini tidak dapat memperlihatkan kesenjangan pendapatan antar penduduk. Meskipun masih terdapat keterbatasan, indikator ini cukup memadai untuk mengetahui tingkat perekonomian suatu wilayah dalam lingkup makro, paling tidak sebagai acuan memantau kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan produk domestik barang dan jasa wilayah tersebut (RKPD Kota Mojokerto Tahun 2022).

Manfaat perhitungan pendapatan perkapita sebagai indikator ekonomi yang mengukur tingkat kemakmuran penduduk suatu wilayah, pendapatan per kapita dihitung secara berkala, biasanya 1 tahun. Manfaat dari perhitungan pendapatan per kapita antara lain sebagai berikut (Alam, 2007):

1. Untuk melihat tingkat perbandingan kesejahteraan masyarakat suatu negara dari tahun ke tahun.
2. Sebagai data perbandingan tingkat kesejahteraan suatu negara dengan negara lain.
3. Sebagai perbandingan tingkat standar hidup suatu negara dengan negara lainnya.
4. Sebagai data untuk mengambil kebijakan di bidang ekonomi. Pendapatan per kapita dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil lahan pertimbangan untuk mengambil langkah di bidang ekonomi.

## **2.7. Leverage**

*Leverage dalam* akuntansi sektor publik ialah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar suatu daerah tergantung pada kreditur dalam membiayai

aset daerahnya. Daerah yang mempunyai tingkat *leverage* tinggi berarti sangat bergantung pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya. Perhitungan rasio *leverage* dalam pemerintahan daerah penting dilakukan bagi kreditor dan calon kreditor dalam membuat keputusan pemberian kredit. Rasio ini akan digunakan oleh kreditor untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utangnya (Sumarjo, 2010 dalam Sari, 2016).

Sumarjo (2010) dalam Kusumawardani (2012) menyatakan bahwa semakin besar *leverage* menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak mampu dalam membiayai operasionalnya sendiri. Oleh sebab itu, pemerintah daerah membutuhkan dana dari pihak eksternal. Sebaliknya, semakin kecil *leverage* menunjukkan semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai biaya operasional melalui dana internalnya.

## **2.8. Opini Audit**

Laporan keuangan pemerintah daerah akan di periksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004).

Opini yang diberikan oleh BPK didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate*

*disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni:

1. Opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*).
2. Opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*).
3. Opini tidak wajar (*adversed opinion*).
4. Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

## **2.9. Penelitian Terdahulu**

Wau dan Ratmono (2015) melakukan penelitian dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketersediaan dan Keteraksesan *Internet Financial Reporting* oleh Pemerintah Daerah. Penelitian Wau dan Ratmono (2015) dilakukan pada Pemerintah kota dan Kabupaten yang ada di Pulau Jawa. Variabel dependen penelitian Wau dan Ratmono (2015) terdiri dari dua variabel yaitu ketersediaan IFR dan keteraksesan IFR sedangkan variabel independen yang diteliti yaitu kompetisi politik, ukuran pemerintah daerah, rasio kemandirian finansial, pendapatan per kapita dan opini audit. Jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 112 pemda. Metode analisis yang digunakan untuk menguji ketersediaan IFR adalah regresi logistik ordinal (PLUM) dan menguji keteraksesan IFR dengan regresi berganda. Hasil penelitian Wau dan Ratmono (2015) untuk variabel dependen ketersediaan IFR oleh pemerintah daerah menunjukkan bahwa pendapatan per kapita dan opini berpengaruh positif terhadap ketersediaan IFR oleh pemerintah

daerah, sedangkan kompetisi politik, ukuran pemerintah daerah dan kemandirian finansial pemda tidak berpengaruh terhadap ketersediaan IFR oleh pemerintah daerah. Hasil penelitian Wau dan Ratmono (2015) untuk variabel dependen keteraksesan IFR pada website pemerintah daerah menunjukkan bahwa kemandirian finansial pemda berpengaruh positif terhadap keteraksesan IFR pada website pemerintah daerah, sedangkan kompetisi politik, ukuran pemerintah daerah, pendapatan per kapita dan opini tidak berpengaruh terhadap keteraksesan IFR pada website pemerintah daerah.

Verawaty (2015) melakukan penelitian dengan judul Determinan Aksesibilitas *Internet Financial Reporting* Melalui *E-Government* Pemerintah Daerah di Indonesia. Data penelitian Verawaty (2015) dikumpulkan melalui observasi dengan media internet terhadap ketersediaan *egovernment* pada 33 pemerintah daerah tingkat provinsi dan 33 pemerintah kabupaten/kota di Indonesia serta ketersediaan IFR (*Internet Financial Reporting*) pada sampel yang ada. Variabel dependen yang diteliti ialah aksesibilitas laporan keuangan di internet atau IFR (*Internet Financial Reporting*) melalui *egovernment*. Variabel independen yang diteliti ialah ukuran pemerintah daerah, *income per capita*, dan *debt level*. Alat analisis menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian Verawaty (2015) menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap aksesibilitas laporan keuangan di internet atau IFR (*Internet Financial Reporting*), *income per capita* tidak berpengaruh terhadap aksesibilitas laporan keuangan di internet atau IFR (*Internet Financial Reporting*) dan *debt level* tidak berpengaruh

terhadap aksesibilitas laporan keuangan di internet atau IFR (*Internet Financial Reporting*).

Khasanah dkk (2017) melakukan penelitian mengenai Determinan Aksesibilitas *Internet Financial Reporting* (IFR) Pemerintah Ibu Kota Propinsi di Indonesia. Sampel penelitian yaitu 20 pemerintah ibu kota propinsi yang ada di Indonesia. Variabel dependen yang diteliti ialah aksesibilitas *Internet Financial Reporting* (IFR). Variabel independen yang diteliti ialah tingkat hutang pemerintah daerah, kekayaan pemerintah daerah, kondisi keuangan, kompetensi politik, opini audit, visibilitas media. Alat analisis menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat hutang pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap aksesibilitas *Internet Financial Reporting* (IFR), Kekayaan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap aksesibilitas *Internet Financial Reporting* (IFR), Kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap aksesibilitas *Internet Financial Reporting* (IFR), Kompetensi politik tidak berpengaruh terhadap aksesibilitas *Internet Financial Reporting* (IFR), Opini audit berpengaruh positif terhadap aksesibilitas *Internet Financial Reporting* (IFR) dan Visibilitas media tidak berpengaruh terhadap aksesibilitas *Internet Financial Reporting* (IFR).

Kurniawan dan Scorpianti (2019) melakukan penelitian dengan judul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketersediaan dan Keteraksesan *Internet Financial Reporting* oleh Pemerintah Daerah Di Indonesia. Obyek yang digunakan dalam dalam penelitian ini adalah *Website* seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Dari 494 *website* pemerintah daerah di Indonesia, hanya 40 *website* saja yang dapat dijadikan sampel penelitian. Variabel dependen yang diteliti sebanyak dua variabel

yaitu ketersediaan dan keteraksesan *internet financial reporting* oleh pemerintah daerah. Variabel independen yang diteliti yaitu *leverage*, opini audit dan kemandirian keuangan pemerintah daerah. Alat analisis untuk variabel dependen ketersediaan *internet financial reporting* menggunakan analisis regresi logistik ordinal atau PLUM (*Polytomous Universal Model*). Alat analisis untuk variabel dependen keteraksesan *internet financial reporting* menggunakan regresi linier variabel *dummy*. Hasil penelitian untuk variabel dependen ketersediaan *internet financial reporting* memberikan hasil *leverage* berpengaruh negatif terhadap ketersediaan *internet financial reporting*, opini audit tidak berpengaruh terhadap ketersediaan *internet financial reporting* dan kemandirian keuangan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap ketersediaan *internet financial reporting*. Hasil penelitian untuk variabel dependen keteraksesan *internet financial reporting* memberikan hasil *leverage* tidak berpengaruh terhadap keteraksesan *internet financial reporting*, opini audit berpengaruh positif terhadap ketersediaan *internet financial reporting*, kemandirian keuangan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap ketersediaan *internet financial reporting*.

Putra dan Syofyan (2020) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Ukuran Pemerintah, Pendapatan Per Kapita dan *Leverage* Terhadap Keteraksesan *Internet Financial Report* oleh Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat). Jumlah sampel yang diteliti sebanyak 19 kota/kabupaten di Sumatera Barat. Variabel dependen yang diteliti adalah keteraksesan *internet financial report* oleh pemerintah daerah. Variabel independen yang diteliti ukuran pemerintahan, pendapatan per kapita dan *leverage*.

Alat analisis menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian Putra dan Syofyan (2020) menunjukkan bahwa ukuran pemerintahan berpengaruh negatif terhadap ketersediaan *internet financial reporting*, pendapatan per kapita tidak berpengaruh negatif terhadap ketersediaan *internet financial reporting* dan *leverage* tidak berpengaruh negatif terhadap ketersediaan *internet financial reporting*.

Perdana dan Achmad (2018) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kekayaan Pemerintah Daerah, Kompetisi Politik, Opini Audit dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Aksesibilitas *Internet Financial Reporting* (IFR) pada Pemerintah Daerah di Indonesia. Sampel penelitian yaitu 60 pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Variabel dependen yang diteliti adalah aksesibilitas IFR pada pemerintah daerah. Variabel independen yang diteliti adalah kekayaan pemerintah daerah, kompetisi politik, opini audit, dan indeks pembangunan manusia. Alat analisis menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekayaan pemerintah daerah, kompetisi politik, opini audit, dan indeks pembangunan manusia berpengaruh positif terhadap aksesibilitas IFR pada pemerintah daerah di Indonesia.

Secara ringkas mengenai hasil penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1

## Hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti	Variabel	Sampel	Hasil
Wau dan Ratmono (2015)	Variabel dependen: ketersediaan IFR dan keteraksesan IFR Variabel independen: kompetisi politik, ukuran pemerintah daerah, rasio kemandirian finansial, pendapatan per kapita dan opini audit	Pemerintah kota dan Kabupaten yang ada di Pulau Jawa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendapatan per kapita dan opini berpengaruh positif terhadap ketersediaan IFR oleh pemerintah daerah, sedangkan kompetisi politik, ukuran pemerintah daerah dan kemandirian finansial pemda tidak berpengaruh terhadap ketersediaan IFR oleh pemerintah daerah.</li> <li>- Kemandirian finansial pemda berpengaruh positif terhadap keteraksesan IFR pada website pemerintah daerah, sedangkan kompetisi politik, ukuran pemerintah daerah, pendapatan per kapita dan opini tidak berpengaruh terhadap keteraksesan IFR pada website pemerintah daerah.</li> </ul>
Verawaty (2015)	Variabel dependen: Aksesibilitas laporan keuangan di internet atau IFR ( <i>Internet Financial Reporting</i> ) melalui <i>egovernment</i> Variabel independen: ukuran pemerintah daerah, <i>income per capita</i> , dan <i>debt level</i>	33 pemerintah daerah tingkat provinsi dan 33 pemerintah kabupaten/kota di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap aksesibilitas laporan keuangan di internet atau IFR (<i>Internet Financial Reporting</i>).</li> <li>- <i>Income per capita</i> tidak berpengaruh terhadap aksesibilitas laporan keuangan di internet atau IFR (<i>Internet Financial Reporting</i>).</li> <li>- <i>Debt level</i> tidak berpengaruh terhadap aksesibilitas laporan keuangan di internet atau IFR (<i>Internet Financial Reporting</i>).</li> </ul>

Khasanah dkk (2017)	<p>Variabel dependen: aksesibilitas <i>Internet Financial Reporting</i> (IFR)</p> <p>Variabel independen: tingkat hutang pemerintah daerah, kekayaan pemerintah daerah, kondisi keuangan, kompetensi politik, opini audit, visibilitas media</p>	Pemerintah ibu kota propinsi yang ada di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat hutang pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap aksesibilitas <i>Internet Financial Reporting</i> (IFR).</li> <li>- Kekayaan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap aksesibilitas <i>Internet Financial Reporting</i> (IFR).</li> <li>- Kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap aksesibilitas <i>Internet Financial Reporting</i> (IFR).</li> <li>- Kompetensi politik tidak berpengaruh terhadap aksesibilitas <i>Internet Financial Reporting</i> (IFR).</li> <li>- Opini audit berpengaruh positif terhadap aksesibilitas <i>Internet Financial Reporting</i> (IFR).</li> <li>- Visibilitas media tidak berpengaruh terhadap aksesibilitas <i>Internet Financial Reporting</i> (IFR).</li> </ul>
Kurniawan dan Scorpianti (2019)	<p>Variabel dependen: ketersediaan dan keteraksesan <i>internet financial reporting</i> oleh pemerintah daerah</p> <p>Variabel independen: <i>leverage</i>, opini audit dan kemandirian keuangan pemerintah daerah</p>	Seluruh pemerintah daerah di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap ketersediaan <i>internet financial reporting</i>.</li> <li>- Opini audit tidak berpengaruh terhadap ketersediaan <i>internet financial reporting</i>.</li> <li>- Kemandirian keuangan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap ketersediaan <i>internet financial reporting</i>.</li> <li>- <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap keteraksesan <i>internet financial reporting</i>.</li> <li>- Opini audit berpengaruh positif terhadap keteraksesan <i>internet financial reporting</i>.</li> <li>- Kemandirian keuangan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap keteraksesan <i>internet financial reporting</i>.</li> </ul>

Putra dan Syofyan (2020)	Variabel dependen: keteraksesan <i>internet financial report</i> oleh pemerintah daerah Variabel independen: ukuran pemerintahan, pendapatan per kapita dan <i>leverage</i>	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ukuran pemerintahan berpengaruh negatif terhadap keteraksesan <i>internet financial reporting</i> oleh pemerintah daerah.</li> <li>- Pendapatan per kapita tidak berpengaruh terhadap keteraksesan <i>internet financial reporting</i> oleh pemerintah daerah.</li> <li>- <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap keteraksesan <i>internet financial reporting</i> oleh pemerintah daerah.</li> </ul>
Perdana dan Achmad (2018)	Variabel dependen: aksesibilitas IFR pada pemerintah daerah Variabel independen: kekayaan pemerintah daerah, kompetisi politik, opini audit, dan indeks pembangunan manusia	Pemerintah daerah kabupaten/kota di pulau Jawa	Kekayaan pemerintah daerah, kompetisi politik, opini audit, dan indeks pembangunan manusia berpengaruh positif terhadap aksesibilitas IFR pada pemerintah daerah di Indonesia.

## 2.10. Pengembangan Hipotesis

### 1. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Keteraksesan *Internet Financial Reporting* Oleh Pemerintah Daerah

Semakin besar ukuran perusahaan menunjukkan semakin banyak kekayaan yang dikelola pemerintah daerah (Hardiningsih dkk, 2021). Pengawasan terhadap kegiatan pemerintahan akan lebih ketat pada pemerintah daerah dengan kekayaan yang besar dibandingkan pemerintah daerah dengan kekayaan yang kecil. Publikasi laporan keuangan merupakan salah satu bentuk sinyal positif yang dapat diberikan oleh pemerintah. Pengungkapan informasi keuangan yang disajikan secara lengkap menunjukkan inisiatif bagi pemerintah daerah tersebut untuk lebih transparan dalam pengelolaan pemerintahannya. Melalui internet, pemerintah daerah dapat memberikan informasi keuangan secara cepat (Trisnawati dan Achmad, 2014 dalam Nufus dkk, 2019). Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang diajukan:

H<sub>1</sub>: Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap keteraksesan *internet financial reporting* oleh pemerintah daerah.

### 2. Pengaruh Pendapatan per Kapita Terhadap Keteraksesan *Internet Financial Reporting* Oleh Pemerintah Daerah

Daerah-daerah dengan pendapatan perkapita yang tinggi kemungkinan akan memberikan aksesibilitas yang lebih mudah terhadap data laporan keuangan melalui *e-government* yang dimiliki. Hal ini dikarenakan daerah dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi akan memiliki tingkat

pengawasan politis yang lebih tinggi oleh kelompok masyarakat dan lebih banyak permintaan akan informasi yang dapat menyediakan ukuran-ukuran kinerja. Kemudahan penggunaan internet saat ini menyebabkan semakin banyak kelompok masyarakat menyadari fungsi data laporan keuangan sebagai bagian dari serangkaian informasi untuk akuntabilitas daerah, semakin banyak individu akan mengharapkan akses terhadap data ini dalam suatu bentuk format elektronik yang paling nyaman atau paling mudah oleh mereka. Individu-individu ini akan meminta kualitas informasi dan akses yang sama di *website* pemerintah (Verawaty, 2015). Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang diajukan:

H<sub>2</sub>: Pendapatan per kapita berpengaruh positif terhadap keteraksesan *internet financial reporting* oleh pemerintah daerah.

### **3. Pengaruh *Leverage* Terhadap Keteraksesan *Internet Financial Reporting* Oleh Pemerintah Daerah**

Pemerintah dapat menggunakan utang untuk membiayai pelayanan dan program yang relevan untuk disediakan bagi penduduk di daerah tersebut. Pemberi utang (debitur) akan menuntut transparansi dan akuntabilitas dengan cara yang paling aplikatif atau dengan kata lain aksesibilitas yang lebih mudah dalam hal ini IFR (Verawaty, 2015). Pemerintah daerah akan memilih media yang paling efektif dan efisien yang digunakan untuk memberikan transparansi informasi keuangan, salah satunya melalui IFR. Dengan memberikan kemudahan akses IFR di *website* resmi, pemerintah daerah dapat mengurangi

biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi tuntutan transparansi informasi keuangan kepada masyarakat (Perdana dan Achmad, 2018). Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang diajukan:

H<sub>3</sub>: *Leverage* berpengaruh negatif terhadap keteraksesan *internet financial reporting* oleh pemerintah daerah.

#### **4. Pengaruh Opini Audit Terhadap Keteraksesan *Internet Financial Reporting* Oleh Pemerintah Daerah**

Opini audit merupakan salah satu indikator akuntabilitas kualitas dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP akan cenderung memberikan kemudahan akses IFR di *website* resmi untuk menunjukkan sinyal positif terhadap pengelolaan keuangan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, jika pemerintah daerah mendapatkan opini audit selain WTP akan menimbulkan konotasi atau persepsi publik akan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga pemerintah daerah cenderung menutupi informasi keuangannya (Tisnawati, 2014 dalam Perdana dan Achmad, 2018).

Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang diajukan:

H<sub>4</sub>: Opini audit berpengaruh positif terhadap keteraksesan *internet financial reporting* oleh pemerintah daerah.